



Rencana Strategis
Komisi Pemberantasan Korupsi
2004-2007

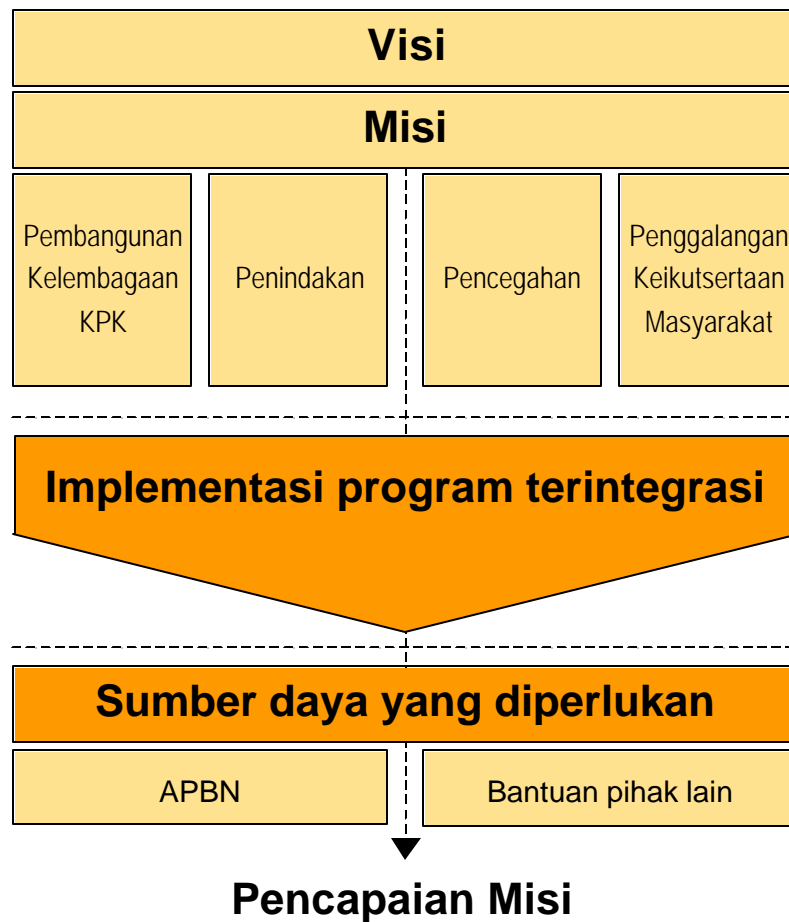
Draft untuk mendapatkan masukan

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Pendekatan Perencanaan Stratejik	3
Visi.....	4
Misi	4
Pembangunan Kelembagaan.....	5
Penindakan.....	6
Pencegahan.....	7
Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat	8
Sumberdaya Yang Diperlukan.....	9

Pendekatan Perencanaan Strategik

Pendekatan yang dipilih untuk merumuskan Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah diawali dengan merumuskan Visi dan Misi KPK yang telah dilakukan oleh kelima Anggota Pimpinan KPK dengan dibantu oleh suatu tim konsultan. Setelah itu, diikuti dengan merumuskan tujuan-tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam waktu empat tahun maupun dalam jangka waktu pendek (satu tahun). Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan tersebut selanjutnya dirancang strategi-strategi.



Setelah dirumuskan strategi-strategi yang selanjutnya diikuti dengan penjabarannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang dinyatakan sebagai Rencana Kerja, diidentifikasi pula sumberdaya-sumberdaya yang akan dipergunakan untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan tersebut.

Visi

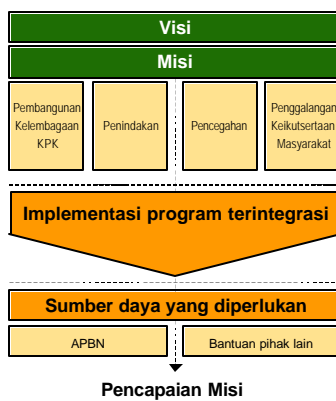
Visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

“Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi”

Misi

Misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

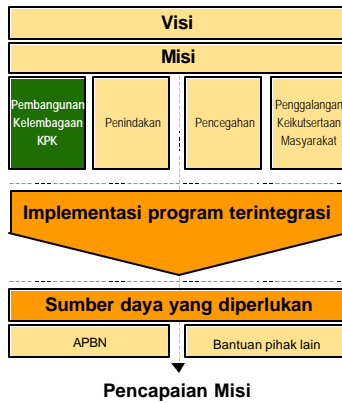
“Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi”



Misi yang telah dirumuskan di atas selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa tujuan yang akan dicapai dengan strategi-strategi yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pembangunan kelembagaan,
2. Penindakan,
3. Pencegahan, dan
4. Penggalangan keikutsertaan masyarakat.

Pembangunan Kelembagaan

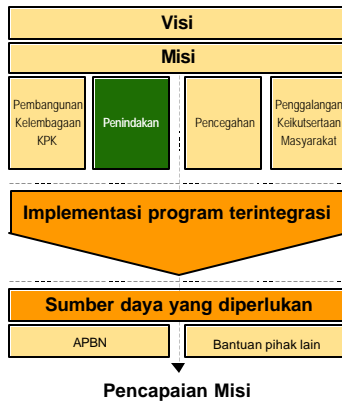


Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pembangunan kelembagaan ini adalah terbentuknya suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang efektif.

Strategi pembangunan kelembagaan ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari:

1. Penyusunan struktur organisasi
2. Penyusunan kode etik
3. Penyusunan rencana strategis
4. Penyusunan rencana kinerja
5. Penyusunan anggaran
6. Penyusunan prosedur operasi standar
7. Penyusunan sistem manajemen sumber daya manusia
8. Rekrutmen penasihat dan pegawai serta pengembangan pegawai
9. Penyusunan sistem manajemen keuangan
10. Penyusunan teknologi informasi pendukung
11. Penyediaan peralatan dan fasilitas
12. Penyusunan mekanisme pengawasan internal

Penindakan



Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penindakan ini adalah meningkatnya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

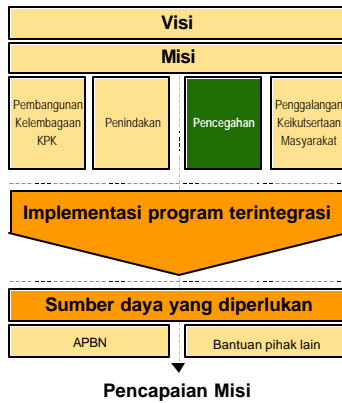
Strategi penindakan ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Pengembangan mekanisme, sistem dan prosedur supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan
4. Identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antar undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi
5. Pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasikan tindak pidana korupsi

Catatan untuk butir 2:

1. Penentuan target untuk penindakan (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) tidak dapat dikemukakan dalam dokumen ini,
2. Dibuka kesempatan luas bagi publik untuk mengusulkan target yang harus ditindak.

Pencegahan

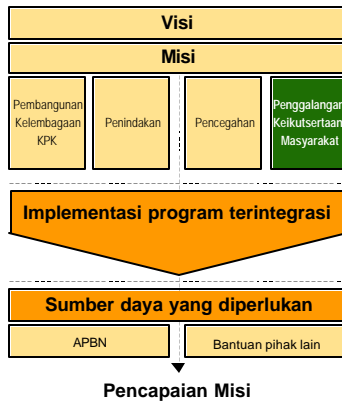


Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi pencegahan ini adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal.

Strategi pencegahan ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari:

1. Peningkatan efektifitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara
2. Penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi
3. Penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi
4. Pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berindikasikan korupsi
5. Penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi

Penggalangan Keikutsertaan Masyarakat

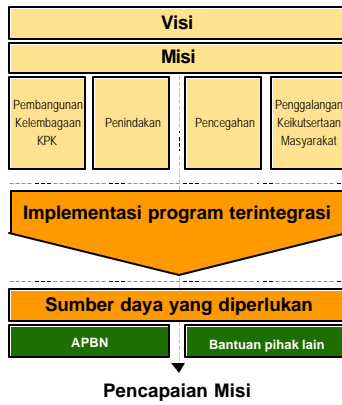


Tujuan yang ingin dicapai oleh strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi.

Strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat ini dijabarkan dalam sejumlah kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengembangan hubungan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga publik disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi
2. Pengembangan hubungan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, sosial, keagamaan, profesi, dunia usaha, swadaya masyarakat (LSM) dll., disertai dengan perumusan peran masing-masing dalam upaya pemberantasan korupsi
3. Pengembangan hubungan kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mitra pemberantasan korupsi di luar negeri secara bilateral maupun multi lateral
4. Pengembangan dan pelaksanaan kampanye anti korupsi nasional yang terintegrasi dengan diarahkan untuk membentuk budaya anti korupsi
5. Pengembangan data base profil korupsi
6. Pengembangan dan penyediaan akses kepada publik terhadap informasi yang berkaitan dengan korupsi

Sumberdaya Yang Diperlukan



Sumberdaya yang diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sumberdaya berasal dari pihak lain, misalnya bantuan dari masyarakat/publik atau donor dapat diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tambahan terhadap sumberdaya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.